



PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR : 1 TAHUN 1994
TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
TAHUN 1994/1995 - 1998/1999

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah yang merupakan Tahun terakhir dari Pembangunan Jangka Panjang Pertama telah menghasilkan kemajuan dalam segala aspek kehidupan sebagai landasan untuk memasuki Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah ;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab perlu disusun Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sebagai penjabaran Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dan merupakan landasan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

c. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1994/1995 - 1998/1999 yang didalamnya mengandung Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah mempunyai arti khusus dan strategis, karena merupakan tahapan pertama Pembangunan Jangka Panjang Kedua dan sekaligus memasuki proses tinggal landas pembangunan sebagai Pengamalan Pancasila ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Salatiga .

- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Dati I Jawa Tengah Tahun 1995 Nomor 6) ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Memperhatikan : Saran, pendapat, usul pada rapat - rapat Paripurna dan rapat - rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dalam pembahasan Rancangan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Tingkat II Salatiga .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH-KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA TENTANG POLA DASAR
PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SALATIGA TAHUN 1994/
1995 - 1998/1999.

Pasal 1

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga adalah Pokok - pokok kebijaksanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sebagai penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang disesuaikan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di Daerah.

Pasal 2

Pola Dasar Pembangunan Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga terdiri dari Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah dan Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah yang isinya mencakup seluruh aspek pembangunan yang dilaksanakan di Daerah dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB III PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA DAERAH
- BAB IV PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM DAERAH
- BAB V PELAKSANAAN
- BAB VI PENUTUP

Pasal 3

Isi beserta uraian Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah

Tingkat II Salatiga yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Daerah ini disusun Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga disusun sebagai Pedoman bagi Aparatur Pemerintah Daerah, Aparatur Pusat di Daerah dan masyarakat di Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan di Daerah.

Pasal 6.

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lain yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah - ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 29 Maret 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

ttd

ttd.

RUPA GINTING

DRS. INDRO SUPARNO

DISAHKAN

Dengan

Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Tengah

tanggal : 20 Juni 1996 No. 188.3/188/1996

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

ttd.

SUDJI ASTOTO, SH

Pembina

NIP. 010.088.157

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga

Nomor : 11 Tanggal 27 Juni 1996

Tahun 1996, Seri D Nomor 6

Sekretaris Kotamadya / Daerah

Drs. SUWARSO

NIP. 010 041 593

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR : 1 TAHUN 1994

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TAHUN 1994/1995 - 1998/1999

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka memberikan kejelasan arah dan pedoman dalam peningkatan pelaksanaan pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga diperlukan adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah yang disusun berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Garis - garis Besar Haluan Negara yang merupakan rangkaian kebijaksanaan Pembangunan Daerah di segala bidang, berlangsung secara bertahap berkesinambungan dan terus menerus, disesuaikan dengan pentahapan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Rencana Pembangunan Lima Tahun Nasional.

Dengan demikian Pola Dasar Pembangunan Daerah tersebut merupakan landasan kebijaksanaan untuk menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah.

Pola Dasar Pembangunan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ini disusun untuk menjamin agar pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dapat terselenggara secara serasi, selaras dan seimbang dengan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pembangunan Daerah Tingkat II lainnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 3 : cukup jelas.

Pasal 4 : Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah yang berisikan Program - program Pembangunan yang akan dilaksanakan di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dituangkan dalam Surat Keputusan Walikotaamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang disusun dengan memperhatikan saran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Salatiga.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

NASKAH
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga adalah pokok - pokok kebijaksanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sebagai penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan memperhatikan kondisi , potensi, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah sebagai pedoman bagi Aparatur Pemerintah Daerah, Aparatur Pemerintah Pusat di Daerah, dan masyarakat di Daerah Kotamadya Daerah baik Tingkat II Salatiga dalam menyelenggarakan Pembangunan Daerah jangka menengah lima tahun maupun

jangka panjang dua puluh lima tahun.

Sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dalam rangka mengisi dan menunjang tujuan pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

C. LANDASAN

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan Idiil dan Undang - Undang Dasar 1945 sebagai landasan Konstitusional serta Garis - Garis Besar Haluan Negara sebagai landasan Operasional.

D. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga pada dasarnya terdiri dari Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah dan Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah, yang materinya mencakup seluruh aspek pembangunan yang dilakukan di Daerah, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PEMBANGUNAN DAERAH

BAB III PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA DAERAH

BAB IV PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM DAERAH

BAB V PELAKSANAAN

BAB VI PENUTUP

BAB II

PEMBANGUNAN DAERAH

A. KONDISI DAN POTENSI DAERAH

Sesuai dengan modal dasar dan faktor - faktor dominan sebagaimana tertuang dalam Garis - Garis Besar Haluan Negara, maka kondisi dan potensi Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang dapat dikembangkan dan didayagunakan untuk pembangunan daerah yaitu sebagai berikut :

1. KONDISI

a. Bidang Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga pada Pelita V, periode 1988 - 1992 berdasarkan harga konstan tahun 1983 rata - rata pertahun sebesar 8,26% yang didukung oleh pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 20,05%, sektor pemerintahan dan hankam sebesar 10,04%, sektor bangunan sebesar 8,31%, sektor perdagangan 8,23%, sektor jasa - jasa 7,91% dan sektor listrik, gas dan air minum sebesar 7,70%. Sedangkan sektor - sektor dominan yang memberikan sumbangan besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto pada tahun 1992 berdasarkan harga konstan tahun 1983 adalah sektor industri sebesar 21,57%, sektor pemerintahan dan hankam sebesar 20,20%, sektor perdagangan 15,07%, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,89%. dan sektor pertanian sebesar 7,78%.

Pertumbuhan pendapatan perkapita dalam periode yang sama rata - rata per tahun sebesar 4,04% atau dari Rp.564.256,00 menjadi Rp. 662.081,00. Sedangkan pertumbuhan perkapita berdasarkan harga berlaku dalam periode yang sama rata - rata per tahun sebesar 10,68% atau dari Rp. 833.675,00 menjadi Rp. 1.250.954,00. Dalam hal produktivitas tenaga kerja tertinggi adalah sektor perdagangan dan terendah adalah sektor pertanian .

b. Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan.

Jumlah penduduk Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga pada tahun 1992 kurang lebih 142.890 jiwa, terdiri dari laki - laki 68.930 jiwa (48,24 %) dan perempuan 73.960 jiwa (51,76 %). Angka rata - rata kepadatan penduduk 2.341 jiwa per km dengan tingkat penyebaran yang tidak merata.

Tingkat kesejahteraan rakyat telah menunjukkan peningkatan dalam periode 1988 - 1992 hal ini dapat dilihat dari melek huruf meningkat dari 96,35% menjadi 98,40%, angka kematian bayi menurun dari 7,14 per mil menjadi 5,66 per mil , dan usia harapan hidup meningkat dari 61 tahun menjadi 65 tahun. Keadaan pendidikan mulai dari Taman Kanak - Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi mengalami peningkatan baik mutu maupun sarana dan prasarannya.

c. Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa .

Pembangunan dibidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menunjukkan peningkatan baik keimanan dan ketaqwaan maupun sarana dan prasarana peribadatannya.

Dalam periode 1988 - 1992 masjid mengalami peningkatan rata - rata pertahun sebesar 4,06% dan gereja mengalami peningkatan sebesar 8,97%. Penduduk berdasarkan pemeluk agama pada tahun 1992 adalah Islam sebesar 77,52% , Kristen 12,52%, Katholik 6,87%, Bhuda 1,32% dan Hindu 0,30%.

Disamping itu partisipasi umat dalam pembangunan cukup tinggi, hal ini dapat ditunjukkan besarnya swadaya dalam membangun prasarana peribadatan.

d. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin besar perannya terhadap pembangunan melalui peningkatan produktivitas sumber daya pembangunan khususnya teknologi produksi.

e. Bidang Hukum.

Pembangunan bidang hukum telah mengalami kemajuan baik dalam sistem hukum maupun produk hukum yang dapat mengayomi, melindungi, menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban bagi penyelenggaraan pembangunan di daerah.

f. Bidang Politik, Aparatur Pemerintah, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa.

Keadaan politik di daerah cukup stabil dengan didukung secara aktif oleh Organisasi-organisasi Sosial Politik dan kemasyarakatan di dalam menunjang dan memacu jalannya pembangunan di Daerah.

Pendaya-gunaan Aparatur Pemerintah berupa penyempurnaan, penyederhanaan, penertiban dan pembinaan faktor-faktor kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pengembangan sumber daya manusia terus meningkat selaras dengan tuntutan dan kemajuan pembangunan.

Jangkauan penerangan, komunikasi dan media massa telah sampai ke Pedesaan melalui berbagai media informasi baik cetak maupun elektronika.

g. Ketentraman dan Ketertiban.

Bahwa kondisi penataan kemampuan segenap komponen pertahanan keamanan di Daerah makin mantap, yang menjamin kehidupan masyarakat yang tenang serta terlindung dari hakekat ancaman.

Penataan perangkat dan perwujudan rakyat terlatih, adanya kemanunggalan ABRI - Rakyat semakin memantapkan persatuan dan kesatuan bagi pembangunan bangsa.

2. POTENSI

a. Potensi Geografis.

Letak Geografis Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga terletak diantara $110^{\circ}28'$ - $110^{\circ}32'$ bujur timur dan $7^{\circ}17'$ - $7^{\circ}23'$ lintang selatan. Salatiga beriklim sejuk dan nyaman terletak dilereng gunung Merbabu dengan ketinggian antara 450 meter - 800 meter dari permukaan laut merupakan potensi yang dapat dikembangkan sebagai penunjang kegiatan pariwisata yang berada disekitar kota Salatiga.

b. Sumber Daya Alam.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 luas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang semula 1787,275 Ha menjadi 5678,11 Ha terdiri dari 4 Kecamatan, 9 Kelurahan dan 13 Desa, dengan komposisi Tata Guna Tanah pada tahun 1992 adalah tanah basah 14,18%, tanah kering 59,64% dan tanah lainnya 26,18%.

c. Sumber Daya Manusia .

Jumlah Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga pada tahun 1992 berjumlah \pm 142.890 jiwa, dengan jumlah penduduk usia produktif sebesar 93.653 jiwa atau 65,54 % merupakan modal utama yang sangat menguntungkan bagi pembangunan segala bidang, apabila dibina ketrampilan dan kemampuannya untuk proses pembangunan.

d. Pusat Pertumbuhan.

Dengan semakin berperannya Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sebagai pusat pertumbuhan terhadap daerah pinggiran di sekitar akan dapat dimanfaatkan bagi upaya peningkatan laju pertumbuhan dan pengembangan pembangunan di Daerah Tingkat II Salatiga.

B. MAKNA DAN HAKEKAT

Makna Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga adalah pembangunan dari dan untuk masyarakat, yang dilakukan oleh masyarakat bersama - sama dengan pemerintah daerah dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat secara berencana, bertahap dan berkesinambungan, sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang sebagai perwujudan Wawasan Identitas Jawa Tengah dan Wawasan Nusantara.

Pada hakekatnya pembangunan daerah adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya, yang merata baik materiil maupun spiritual.

C. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan yang sehat, tertib, indah dan aman.

D. AZAS PEMBANGUNAN DAERAH

Azas Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tentunya tidak lepas dari azas pembangunan Nasional yang pada prinsipnya harus dipegang teguh dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pengendalian pembangunan di daerah. Adapun azas - azas tersebut adalah :

1. Azas Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etik dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila.

2. Azas Manfaat : bahwa segala usaha dan kegiatan Pembangunan Nasional memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan pribadi warga negara serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
3. Azas Demokrasi Pancasila, bahwa upaya mencapai tujuan pembangunan nasional yang meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang bercirikan kebersamaan, gotong royong, persatuan dan kesatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
4. Azas Adil dan Merata : bahwa pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata disemua lapisan masyarakat dan diseluruh wilayah tanah air dimana setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasil-hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darma baktinya yang diberikan kepada bangsa dan negara.
5. Azas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan dalam Perikehidupan : bahwa dalam pembangunan nasional harus ada keseimbangan antara berbagai kepentingan, yaitu keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan dunia dan akherat, materiil dan spirituil, jiwa dan raga, individu, masyarakat dan negara, pusat dan daerah serta antar daerah, kepentingan perikehidupan darat, laut, udara dan dirgantara serta kepentingan nasional dan internasional.
6. Azas Hukum : bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional setiap warga negara dan penyelenggaraan negara harus taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran serta negara diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.
7. Azas Kemandirian : bahwa pembangunan nasional berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersandikan kepada kepribadian bangsa.

8. Azas Kejuangan : bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional penyelenggara negara dan masyarakat harus memiliki mental, tekad, jiwa dan semangat pengabdian serta ketaatan dan disiplin yang tinggi dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan .

9. Azas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi : bahwa agar pembangunan nasional dapat memberikan kesejahteraan rakyat lahir batin yang setinggi - tingginya, penyelenggaraannya perlu menerapkan nilai - nilai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendorong pemanfaatan , pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara seksama dan bertanggung jawab dengan memperhatikan nilai - nilai agama dan nilai - nilai luhur budaya bangsa.

10. Azas Desentralisasi : bahwa urusan - urusan yang telah diserahkan kepada daerah pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya .

Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaannya.

11. Azas Dekonsentrasi : bahwa dalam pembangunan urusan - urusan yang sudah dilimpahkan kepada daerah pada dasarnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, baik mengenai perencanaan , pelaksanaan maupun pembiayaannya. Unsur - unsur pelaksanaannya terutama adalah instansi - instansi vertikal, yang dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku perangkat pemerintah pusat di daerah, tetapi kebijakan terhadap pelaksanaan urusan - urusan ini sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat.

12. Azas Tugas Pembantuan : bahwa beberapa urusan pemerintah yang masih tetap merupakan urusan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah Tingkat I dapat ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II untuk melaksanakannya , dengan disertai pembiayaannya.

E. MATRA RUANG PEMBANGUNAN DAERAH

Matra Ruang Pembangunan Daerah dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, adalah penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang disesuaikan dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat daerah, merupakan rumusan pokok-pokok strategi dan kebijakan, pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan arah pembangunan daerah, dan berfungsi sebagai pedoman dan acuan bagi masyarakat bersama - sama Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Tujuan ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga adalah untuk mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat dan warga kota yang sehat tertib, bersih, indah dan aman, serta mewujudkan fungsi kota sebagai kota Pendidikan dan Olah Raga, Pusat Kegiatan Perdagangan dan Transit Pariwisata , melalui :

- a. Perwujudan pemanfaatan ruang yang serasi dan seimbang dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan kota secara optimal.
- b. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan, berdaya guna dan berhasil guna , sejalan dengan tujuan dan kebijaksanaan pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan pembangunan nasional.
- c. Menggali dan meningkatkan serta mengembangkan segala potensi yang dimiliki daerah, didukung oleh kemampuan aparatur pemerintah serta peran serta masyarakat dalam pembangunan disegala bidang.

BAB III

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA DAERAH

A. UMUM

1. Hasil - hasil Pembangunan Jangka Panjang Pertama.
 - a. Pembangunan Jangka Panjang Pertama telah menghasilkan kemajuan dalam segala aspek kehidupan dan telah meletakkan landasan yang cukup kuat untuk memasuki Pembangunan Jangka Panjang Kedua sebagai tekad untuk mewujudkan kemandirian dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan lahir batin.
 - b. Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan dapat dicapai berkat peran serta rakyat secara menyeluruh, serta mantapnya stabilitas pemerintahan yang meliputi stabilitas ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.
 - c. Pembangunan ekonomi pada Pembangunan Jangka Panjang Pertama telah banyak mengalami kemajuan dan telah berhasil meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari peningkatan produk domestik regional bruto dan terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat. Keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi telah memberikan dukungan dan dorongan terhadap pembangunan dibidang - bidang lainnya sehingga dapat terwujud landasan yang kuat untuk pembangunan tahap berikutnya.
 - d. Pembangunan Jangka Panjang Pertama telah meningkatkan

kesejahteraan rakyat, hal ini tercermin dalam peningkatan kualitas hidup, terselenggaranya pendidikan yang merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta telah dituntaskannya program wajib belajar tingkat dasar, dengan demikian pendidikan yang dilaksanakan juga telah menghasilkan kader pembangunan yang berkualitas.

Pembangunan dibidang kesehatan dan keluarga berencana telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan dapat meningkatkan derajat kesehatan, sehingga mampu meningkatkan usia harapan hidup. Pembangunan Keluarga Berencana telah dapat menekan laju pertumbuhan penduduk, serta dapat menekan angka kematian bayi.

- e. Selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama kerukunan hidup antar dan antara umat beragama dan penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, peran serta umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam pembangunan, dan kualitas kehidupan beragama semakin meningkat, tata nilai dan norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara makin mantap serta dapat menumbuhkan dan memperkokoh sikap dan perilaku manusia Indonesia yang makin maju, mandiri dan berkepribadian luhur.
 - f. Pembangunan hukum telah banyak mengalami kemajuan dalam sistem hukum dan produk hukum yang dapat mengayomi, melindungi dan menegakkan keadilan, kebenaran serta ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.
 - g. Pembangunan politik semakin meningkat dengan tatanan kehidupan ber-politik dan kenegaraan berdasarkan Demokrasi Pancasila dan semakin berfungsinya organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan sehingga mampu mendorong meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam kehidupan ber - politik.
2. Masalah - masalah pokok yang belum terselesaikan dalam pembangunan jangka panjang pertama.

a. Sarana dan Prasarana Ekonomi.

- 1). Terbatas dan belum meratanya sarana prasarana usaha dan kegiatan perdagangan yang mampu mengantisipasi perkembangan kota dan desa dimasa mendatang terutama penyebaran lokasi kegiatan ekonomi yang cenderung terkonsentrasi dipusat kota.
- 2). Kondisi kegiatan usaha kecil dan tradisional serta sektor informal belum terbina dan tertata secara serasi dengan perkembangan kota .
- 3). Sarana prasarana dan penataan kegiatan transportasi baik kualitas maupun kuantitasnya belum mampu mendukung pertumbuhan arus transportasi baik yang berskala regional maupun lokal.
- 4). Masih terbatasnya sarana prasarana pariwisata, sehingga menghambat upaya - upaya pengembangan kegiatan kepariwisataan di daerah.

b. Aparatur Pamarintah.

- 1). Kemampuan aparaturn pemerintah dan prasarana fisik yang belum memadai untuk memenuhi tuntutan kemajuan pembangunan .
- 2). Perkembangan organisasi pelaksana daerah sejalan dengan tingkat kebutuhan daerah dimasa mendatang belum memadai.

c. Kependudukan.

- 1). Penyebaran penduduk yang tidak merata .
 - 2). Masih rendahnya kualitas penduduk terutama tenaga kerja.
 - 3). Pertumbuhan angkatan kerja yang belum diimbangi dengan kesempatan kerja yang tersedia.
 - 4). Belum meratanya pendapatan masyarakat.
3. Isu Pokok dan kendala yang dihadapi Pembangunan Jangka Panjang Kedua.

- a. Peningkatan sumber daya manusia diberbagai aspek kehidupan dan peningkatan pemerataan pembangunan merupakan upaya mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan dengan kendala penambahan kesempatan kerja.
- b. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan kendala belum diimbangnya kemampuan daerah dalam penyelenggaraan tugas - tugasnya.
- c. Peningkatan sarana - prasarana transportasi dan perdagangan sesuai dengan kemajuan pembangunan, dengan kendala terbatasnya faktor produksi.
- d. Kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu terus ditingkatkan, dengan kendala adanya kegiatan - kegiatan yang menimbulkan limbah belum mampu mengatasi .

B. TUJUAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA DAERAH

Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga adalah mewujudkan suatu masyarakat yang semakin maju, mandiri dan sejahtera lahir batin sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya, menuju masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam suasana perikehidupan yang sehat, tertib, bersih, indah dan aman.

C. SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA DAERAH

UMUM

Sasaran Umum Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga adalah terwujudnya masyarakat maju, mandiri dan sejahtera lahir batin menuju masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun

spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 dalam suasana perikehidupan yang sehat, tertib, bersih, indah dan aman.

BIDANG - BIDANG

1. Ekonomi.

Terwujudnya perekonomian yang mandiri dan andal sebagai usaha bersama berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 dengan pertumbuhan yang cukup tinggi, bercirikan industri yang semakin maju, koperasi yang semakin sehat dan kuat, perdagangan yang maju dengan sistem distribusi yang meningkat, pelestarian pertanian dan kemakmuran masyarakat yang semakin meningkat, merata yang didukung dengan kerja sama antara pelaku - pelaku ekonomi dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal serta sumber daya manusia yang berkualitas, maju, produktif, profesional dengan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi demi terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup.

2. Kesejahteraan Rakyat , Pendidikan dan Kebudayaan.

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang semakin sejahtera lahir - batin secara adil dan merata, melalui upaya peningkatan mutu, peningkatan pembinaan anak, remaja, generasi muda dan olah raga, peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, kualitas sosial dasar serta kesehatan ibu dan anak, peningkatan peran serta wanita dalam pembangunan, peningkatan mutu dan cakupan pelayanan bagi penyandang masalah sosial, peningkatan mutu dan jumlah perumahan dan pemukiman sehat, pelestarian dan pengembangan budaya daerah untuk menunjang pengembangan identitas daerah dan budaya nasional.

3. Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Terwujudnya suasana kehidupan beragama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang penuh keimanan dan ketaqwaan, penuh kerukunan yang dinamis antar dan antara umat beragama dan kepercayaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara bersama - sama makin memperkuat landasan spiritual, moral dan etik bagi pembangunan daerah yang dapat tercermin dalam suasana kehidupan yang harmonis serta kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila.

4. Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi.

Terwujudnya kemampuan daerah dalam memanfaatkan, pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan tehnologi serta penelitian yang dibutuhkan bagi pembangunan disegala bidang, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menuju masyarakat mandiri, berkualitas, maju dan sejahtera lahir - batin.

5. Hukum.

Terwujud dan berfungsinya produk - produk hukum di Daerah yang bersumberkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang - Undangan yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta mampu mengamankan, menciptakan ketentraman dan mendorong pembangunan daerah, didukung oleh aparaturnya yang bersih dan berwibawa, sarana dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum.

6. Politik, Aparatur Pemerintah , Penerangan , Komunikasi dan Media Massa.

Terwujud dan berfungsinya tatanan kehidupan politik yang konstitusional berdasarkan Demokrasi Pancasila yang mantap, terkendali dan dinamis , dengan kualitas manusia dan masyarakat yang memiliki kesadaran dan etika politik tinggi serta sikap dan berperilaku sesuai dengan budaya politik Pancasila dalam semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang berwawasan Strategi Identitas Jawa Tengah. Terwujudnya aparaturnya yang semakin bersih , berwibawa, bertanggung jawab, profesional, penuh

pengabdian, berdisiplin tinggi dan memiliki ethos kerja .

Terwujudnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, diperkuat oleh pelaksanaan penerangan komunikasi dan media massa yang mampu menggairahkan peran serta masyarakat, mengoptimalkan dan memanfaatkan hasil - hasil pembangunan disegala bidang.

7. Ketentraman dan Ketertiban

Terwujudnya kekuatan dan kemampuan pertahanan keamanan di Daerah yang andal, mulai penataan perangkat dan perwujudan rakyat terlatih dan perlindungan masyarakat secara bertahap sesuai kebutuhan dan kemampuan. Pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI dan kemanunggalan ABRI - Rakyat makin mantap dan dinamis yang didukung sarana prasarana yang memadai serta keamanan dan ketertiban masyarakat yang mantap.

D. TITIK BERAT PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA DAERAH.

Titik Berat Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga diletakkan pada bidang ekonomi, yang merupakan penggerak utama pembangunan keseimbangan antara sektor pertanian dan industri serta terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan secara merata, Seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang - bidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras, serasi dan seimbang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Nasional.

E. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA DAERAH.

Sejalan dengan Arah Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional Jangka Panjang Kedua sebagaimana yang tertuang dalam Garis - Garis Besar Haluan Negara dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maka Arah Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang dilaksanakan selaras , serasi , seimbang merupakan penjabaran lebih lanjut Arah Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.

2. Pembangunan Jangka Panjang Kedua diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat agar makin maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin berdasarkan Pancasila .

Sikap mental dan sikap hidup yang dapat mendorong percepatan proses pembangunan perlu terus dikembangkan meliputi rasa cinta daerah, semangat pengabdian dan tekad untuk membangun masa depan yang lebih baik juga perlu dibangkitkan guna memperkokoh persatuan dan kesatuan demi terwujudnya tujuan pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan tujuan pembangunan Nasional.

3. Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan geografis, demografis, idiologis, politis, ekonomi, sosial budaya dan Hankamnas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang senantiasa berorientasi kepada kepentingan Nasional dengan mengacu pada Strategi

Wawasan Identitas Jawa Tengah dalam rangka Wawasan Nusantara.

4. Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakasa dan peran aktif masyarakat, mengoptimalkan pendayagunaan potensi daerah dalam mengisi Otonomi Daerah yang nyata, diamis, serasi dan bertanggung jawab melalui usaha - usaha peningkatan kualitas aparatur pemerintah agar memiliki sikap dan perilaku penuh pengabdian, jujur, tanggung jawab, adil dan berwibawa serta mampu memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat.
5. Pembangunan ekonomi diarahkan pada terwujudnya perekonomian daerah yang mandiri dan andal berdasarkan demokrasi ekonomi untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi, stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara selaras, adil dan lebih merata. Pada kegiatan ini perhatian perlu diberikan pada usaha kecil, tradisional dan golongan ekonomi lemah.

Selain itu perlu dibangun koperasi gerakan masyarakat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri yang mampu berperan meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan ekonomi daerah hendaknya didukung dengan kemitraan antara koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Swasta dalam segenap sektor ekonomi.

6. Pembangunan Pendidikan Daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas serta meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, pencapaiannya melalui

peningkatkan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya serta penyediaan sarana prasarana yang memadai baik oleh Pemerintah maupun masyarakat.

Pembinaan Kebudayaan Daerah diarahkan untuk dapat memberi jiwa pada perilaku masyarakat dan pelaksana pembangunan, menyaring dan menyerap nilai budaya dari luar yang positif dan sekaligus menolak nilai budaya dari luar yang merugikan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas manusia berkepribadian bangsa.

7. Pembangunan Kependudukan diarahkan pada peningkatan, pengendalian laju pertumbuhan penduduk sebagai perwujudan Keluarga Kecil Sejahtera dan Bahagia.

Peningkatan kualitas penduduk dilakukan melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi. Sedangkan pengendalian laju pertumbuhan penduduk dilakukan melalui Keluarga Berencana dan Transmigrasi. Peningkatan kualitas penduduk usia muda sebagai penerus generasi bangsa diarahkan untuk mengembangkan sikap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa disegala kesempatan, sedangkan penduduk usia lanjut perlu diperhatikan kesejahteraannya.

8. Pembangunan Kehidupan beragama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa diarahkan untuk meningkatkan kualitas umat beragama dan penganut kepercayaan, sehingga terwujud suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan, ketaqwaan dan kerukunan yang dinamis serta makin meningkatnya peran serta umat dalam pembangunan, dengan didukung oleh sarana prasarana kehidupan beragama yang memadai.

9. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kemampuan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengubah

potensi sumber daya alam daerah menjadi kekuatan - kekuatan ekonomi, sosial budaya, politik dan Hankam.

10. Memelihara dan meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam usaha mengayomi masyarakat supaya hidup tentram lahir dan batin dalam melaksanakan pembangunan yang merupakan syarat dalam terwujudnya disiplin Nasional di Daerah .

11. Pembangunan Politik diarahkan untuk mewujudkan tatanan kehidupan politik berdasarkan Demokrasi Pancasila yang mampu menjamin berfungsinya lembaga politik dan lembaga kemasyarakatan, meningkatkan proses komunikasi dan pengembangan suasana, sikap keterbukaan yang bertanggung jawab. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas pendidikan politik, kaderisasi dan keteladanan politik, moral budaya dan etika politik berdasarkan Pancasila.

12. Pembangunan Ketentraman dan Ketertiban diarahkan pada peningkatan daya tangkal dalam sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta yang didukung oleh manusia profesionalisme yang dijiwai oleh bela negara yang tinggi, kemanunggalan ABRI - Rakyat dan pelaksanaan fungsi politik ABRI yang mantap dan dinamis untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

F. ARAH PENATAAN RUANG DAERAH.

Penataan Ruang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga merupakan bagian integral dari penataan ruang daerah Tingkat I Jawa Tengah, diarahkan untuk mengembangkan dan mewujudkan keserasian dan keseimbangan pembangunan antar Sub wilayah pembangunan di Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Penataan Ruang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk

upaya menunjang mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui pola pemanfaatan ruang daerah perkotaan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkesinambungan.

Pengaturan Tata Ruang diarahkan pada upaya tercapainya pemanfaatan ruang berkualitas melalui upaya distribusi spasial sumber daya yang mampu menjamin efisiensi pemanfaatan dan kelestarian fungsi sumber daya yang secara keseluruhannya akan menjamin upaya peningkatan kemakmuran masyarakat luas. Rencana Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga diarahkan untuk menciptakan struktur ruang daerah perkotaan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, yang semakin mantap dengan upaya peningkatan produktifitas geografis wilayah dan efisiensi sumber daya daerah, melalui pengaturan pemanfaatan ruang bagi fungsi utama kawasan budi daya termasuk pengarahannya penataan kota agar dapat dicapai suasana kehidupan kota yang serasi, selaras dan seimbang.

Rencana Tata Ruang Daerah perkotaan diarahkan untuk mengatur dan meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kota, mengatur dan meningkatkan sarana dan prasarana utilitas kota dengan memperhatikan sumber daya manusia dan kesinambungan sumber daya buatan. Rencana Pemanfaatan tata ruang daerah perkotaan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tidak lepas dengan tata ruang Daerah Tingkat I Jawa Tengah maupun Nasional. Pemanfaatan tata ruang di daerah perkotaan diarahkan pula pada pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya lainnya, sesuai dengan azas penataan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu dan kebersamaan. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang dalam bentuk peloporan dan evaluasi serta pemberian sanksi bagi pelanggar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B A B IV

PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM DAERAH

A. U M U M

1. KAITAN ANTARA PELITA KEENAM DENGAN PELITA - PELITA SEBELUMNYA.

Pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Pertama telah berhasil mewujudkan kerangka landasan sebagai titik tolak bagi upaya pelaksanaan pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah.

Kaitan antara Pelita Keenam Daerah dengan Pelita - Pelita sebelumnya adalah merupakan kelanjutan yang berkesinambungan pembangunan daerah dan tetap dititik beratkan pada pembangunan bidang ekonomi dengan memperhatikan pembangunan bidang - bidang lainnya yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan.

2. MASALAH - MASALAH POKOK YANG BELUM TERSELESAIKAN PADA PELITA LIMA.

- a. Sarana dan Prasarana Ekonomi.

1. Terbatas dan belum meratanya sarana prasarana tempat usaha dan kegiatan perdagangan yang mampu mengantisipasi perkembangan kota dan desa dimasa mendatang terutama penyebaran lokasi kegiatan ekonomi yang cenderung terkonsentrasi di pusat kota.

- b. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan kendala belum diimbangi oleh kemampuan daerah dalam penyelenggaraan tugas - tugasnya.
- c. Kelestarian lingkungan hidup dengan kendala masih rendahnya kesadaran masyarakat penghasil limbah dalam mengatasi hal tersebut.

4. PELUANG YANG DAPAT DIMANFAATKAN DALAM PEMBANGUNAN LIMA TAHUN

- a. Peningkatan investasi di daerah yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun swasta.
- b. Meningkatnya potensi tenaga kerja usia muda, tuntutan daya-saing sumber daya manusia yang cukup tinggi dan besarnya jumlah penduduk usia produktif.
- c. Adanya pertambahan luas wilayah administrasi.
- d. Kedudukan wilayah yang sangat strategis di Jawa Tengah terletak diantara dua pusat pengembangan (Semarang - Surakarta), disamping itu mempunyai iklim yang sejuk dan panorama yang indah.
- e. Menjadi tempat alternatif studi tingkat perguruan tinggi dan pusat pemerintahan baik sipil maupun militer.

B. TUJUAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Jangka Panjang, maka tujuan Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga adalah sejalan dengan tujuan Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Nasional serta memperhatikan kondisi , potensi dan permasalahan di Daerah, maka tujuan pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sebagai berikut :

1. Menumbuhkan sikap dan tekad yang maju dan mandiri masyarakat Salatiga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan lahir batin yang selaras, adil dan merata dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal serta penataan ruang yang serasi dan dinamis.
2. Mewujudkan landasan pembangunan yang mantap untuk pembangunan selanjutnya.

C. SASARAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM DAERAH.

U M U M

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah , serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Nasional, maka sasaran umum Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga adalah tumbuhnya sikap kemandirian dalam diri manusia dan masyarakat melalui peningkatan peran serta secara aktif, efisiensi, dan produktivitas kerja rakyat dalam rangka meningkatkan taraf hidup , kecerdasan, ketentraman , keamanan, perlindungan hukum dan kesejahteraan lahir batin.

BIDANG - BIDANG

EKONOMI

1. INDUSTRI.

- a. Meningkatnya jumlah, produksi, mutu dan pemasaran.
- b. Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha dalam bidang industri.
- c. Meningkatnya kualitas pengusaha dan pengrajin.
- d. Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana guna menampung pengembangan industri.
- e. Meningkatnya investasi dan terwujudnya iklim yang sejuk.
- e. Meningkatnya keseimbangan lingkungan hidup.

2. PERTANIAN.

- a. Meningkatnya produksi, mutu dan pemasaran hasil produksi.
- b. Terlaksananya usaha tani terpadu.
- c. Menggali potensi pertanian yang ada.
- d. Meningkatnya pengetahuan petani.
- e. Meningkatnya jumlah, mutu dan fungsi sarana / prasarana pengairan untuk menunjang pertanian.

3. TENAGA KERJA.

- a. Meningkatnya Pola Perencanaan tenaga kerja di daerah secara terpadu.
- b. Meningkatnya informasi pasar kerja baik Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN).
- c. Meningkatnya kualitas tenaga kerja di segala bidang.
- d. Meningkatnya kegiatan/ usaha yang padat karya.
- e. Meningkatnya jumlah dan mutu tenaga kerja.

4. PERDAGANGAN.

- a. Meningkatnya penyebaran dan penataan sarana prasarana perdagangan.
- b. Meningkatkan penyebaran informasi pasar dan promosi komoditi potensial daerah.
- c. Memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja.
- d. Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan pengusaha khususnya golongan ekonomi lemah.

5. TRANSPORTASI

- a. Meningkatnya sistem transportasi Kota
- b. Meningkatnya pelayanan transportasi.
- c. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi.

6. DUNIA USAHA

- a. Meningkatnya iklim usaha yang sehat dan sejuk yang mampu mendorong pengembangan usaha ekonomi lemah dan kecil.

- b. Meningkatkan kerja sama antar pelaku ekonomi.
- c. Mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah untuk menunjang pembangunan daerah.
- d. Meningkatnya Lembaga / Organisasi Pengusaha Ekonomi Lembah dalam wadah Koperasi.

7. PARIWISATA.

- a. Meningkatnya fungsi kelembagaan Kepariwisataan.
- b. meningkatnya, memelihara dan menggali potensi wisata yang ada.
- c. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata.

8. POS DAN TELEKOMUNIKASI.

- a. Meningkatnya jumlah, mutu dan fungsi sarana prasarana Pos dan Telekomunikasi.
- b. Meningkatnya pengembangan Pos dan Telekomunikasi dan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Meningkatnya koordinasi antar instansi terkait.

9. KOPERASI.

- a. Meningkatnya jumlah dan mutu Koperasi.
- b. Meningkatnya kerja sama Koperasi dengan pelaku ekonomi yang lain.
- c. Meningkatnya kualitas pengelola, Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi.
- d. Diversifikasi usaha.

10. PEMBANGUNAN DAERAH.

- a. Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan organisasi dan pengawasan Pembangunan daerah.
- b. Meningkatnya pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah.
- c. Meningkatnya prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- d. Meningkatnya inventarisasi sumber daya lahan.
- e. Meningkatnya fasilitas dan utilitas kota.

11. KEUANGAN.

- a. Meningkatnya kualitas pengelola sumber pendapatan keuangan daerah.
- b. Meningkatnya pendapatan daerah.
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.
- d. Meningkatnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.
- e. Meningkatnya usaha Perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya.

12. TRANSMIGRASI.

Meningkatnya jumlah dan mutu Transmigrasi melalui penerangan dan penyuluhan secara intensif.

13. ENERGI.

Meningkatnya perluasan jaringan listrik dan pelayanan kepada masyarakat.

14. SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP.

- a. Meningkatnya pemanfaat Sumber Alam dalam pembangunan.
- b. Meningkatnya keseimbangan lingkungan hidup.
- c. Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan, memelihara, melestarikan mutu lingkungan hidup.

KESEJAHTERAAN RAKYAT, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. KESEJAHTERAAN SOSIAL.

- a. Meningkatnya kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial yang merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, memberikan kesempatan seluas - luasnya kepada organisasi sosial dalam melakukan kegiatannya agar masyarakat mampu berperan aktif dalam proses pembangunan kesejahteraan sosial melalui pemantapan dan pengembangan partisipasi sosial masyarakat.
- b. Meningkatnya penyelenggaraan penanganan masalah sosial secara terpadu dan terkoordinasi sehingga dapat dirasakan peningkatannya kesejahteraan yang makin merata bagi seluruh rakyat serta mampu menjadi motivator sosial.
- c. Meningkatnya penanganan penyandang sosial/cacat serta pelayanan panti - panti sosial yang bertujuan

memperbaiki sikap mental individu, keluarga dan masyarakat serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan sehingga bantuan yang diberikan akan lebih bermanfaat.

- d. Meningkatnya perhatian dan penghargaan terhadap para perintis kemerdekaan dengan memberikan bantuan dan kemudahan untuk menunjang kegiatannya.

2. PENDIDIKAN.

- a. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan yang dapat menunjang peningkatan mutu pendidikan baik formal maupun non formal, sehingga dapat membantu dan menggerakkan sikap mental dan perilaku masyarakat dalam rangka melaksanakan pembangunan.
- b. Meningkatnya kesadaran Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam pengawasan dan Pembinaan Pendidikan baik formal maupun non formal yang selaras, serasi dan seimbang sehingga dapat berhasil guna.
- c. Meningkatnya pendidikan penjejangan dan fungsional bagi Aparatur Pemerintah agar dapat memenuhi kualitas yang diharapkan sesuai dengan laju dinamika pembangunan di Daerah.

3. KEBUDAYAAN.

- a. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan nilai budaya yang sesuai dengan kepribadian bangsa dalam menunjang pelestarian kesenian daerah / tradisional yang ada, menggali kebudayaan daerah sendiri sebagai penangkal masuknya budaya asing yang negatif dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.

- b. Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesenian sebagai usaha penyelamatan warisan sejarah baik yang sudah ada maupun untuk masa yang akan datang.
- c. Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan kegiatan antar dinas / instansi / swasta yang terkait dalam rangka pengembangan kesenian daerah dan nasional.

4. KESEHATAN

- a. Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat melalui : peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan yang meliputi pengadaan tenaga dokter ahli, tenaga medis, paramedis, tenaga perawat, tenaga sanitasi Puskesmas serta tenaga gizi. Peningkatan sistem jaringan pelayanan kesehatan yang lebih dekat kepada masyarakat.
- b. Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai kesehatan melalui peningkatan air bersih, pembudayaan hidup bersih dan sehat dengan usaha menjaga dan memperbaiki lingkungan, sanitasi dan pelestarian lingkungan yang bertujuan untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup.
- c. Meningkatkan gizi masyarakat melalui penyuluhan macam makanan bergizi yang sehat dan murah sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah.

5. KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA.

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti gerakan Keluarga Berencana yang lestari , mantap dan mandiri, sehingga dapat menekan tingkat pertumbuhan penduduk guna mencapai Norma

Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera dalam rangka pembangunan manusia Indonesia setuhnya.

b. Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan petugas pengelola kependudukan secara kualitatif terutama peran serta dan tanggung jawab, baik itu wanita maupun pria serta generasi muda dalam pelaksanaan upaya - upaya untuk menanggulangi masalah kependudukan.

c. Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung gerakan Keluarga Berencana, jangkauan pelayanan dalam melakukan kegiatan operasionalnya serta keterpaduan antara lembaga - lembaga keluarga berencana dengan Instansi / Dinas yang terkait.

6. GENERASI MUDA DAN OLAH RAGA.

a. Meningkatnya pengembangan dan pembinaan generasi muda dan olah raga untuk mewujudkan generasi muda sebagai penerus yang sehat, tangguh, bertanggung jawab, cinta tanah air serta memiliki ketrampilan kerja dan mampu memberikan sumbangan yang nyata dalam pembangunan melalui jalur-jalur pembinaan yang ada.

b. Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana pembinaan generasi muda dan olah raga dengan tenaga pengelola maupun tenaga pelatih yang profesional guna mencapai hasil yang maksimal.

c. Meningkatnya pemantauan kegiatan generasi muda dan usaha - usaha penanggulangan pengaruh kebudayaan yang negatif guna menciptakan stabilitas di Daerah.

7. PERANAN WANITA.

Meningkatnya partisipasi keluarga , khususnya wanita dalam usaha mencapai kesejahteraan keluarga dan masyarakat yang selaras dan serasi dengan perkembangan melalui sepuluh Program Pokok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dengan Program Terpadu Lintas Sektoral, khususnya dalam mewujudkan keluarga sehat sejahtera , termasuk pembinaan generasi muda dan anak balita.

8. PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN.

- a. Meningkatnya pemugaran perumahan yang tidak memenuhi syarat - syarat kesehatan.
- b. Meningkatnya mutu perumahan dan perbaikan lingkungan per kampung juga penyediaan fasilitas umum berupa air bersih , listrik dan sanitasi.
- c. Meningkatnya pembangunan perumahan rakyat dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

1. Meningkatnya keadaan yang mantap baik dalam kegiatan kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa , sehingga diharapkan lebih meningkatkan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akherat, antara kepentingan material dan spiritual serta kepentingan jiwa dan raga.

2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana peribadatan, pembinaan dan pengembangan kehidupan keagamaan serta Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, guna meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan.
3. Meningkatnya komunikasi timbal balik antar umat beragama dan penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan pemerintah dan sebaliknya, sehingga tercipta kerukunan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengembangan pendidikan ketrampilan dan kecakapan pembimbing atau penyuluh Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah.

ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga profesional yang dapat menunjang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan hasil - hasil pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dapat segera dikembangkan.
2. Meningkatnya pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi serta penelitian untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang mendesak dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan melalui percobaan - percobaan ilmiah, inovasi dan penyebarluasan teknologi tepat guna termasuk teknologi Tradisional, kegiatan seminar, lokakarya, diskusi dan penelitian yang bekerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Perguruan Tinggi.
3. Meningkatnya komunikasi dalam hal penyebarluasan hasil - hasil penelitian guna peningkatan potensi Daerah dalam rangka memberi masukan yang berarti pada pembangunan

yang dilaksanakan sehingga kelancaran penyampaian laporan / data secara akurat dapat senantiasa terjaga baik dan benar.

HUKUM

1. Meningkatnya penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum masyarakat, sehingga dapat menyadari hak dan kewajiban sebagai Warga Negara yang diharapkan dapat mendukung tertib hukum dan tegaknya keadilan dalam mematuhi peraturan Perundang-Undangan.
2. Meningkatnya tenaga - tenaga yang memenuhi kualifikasi agar didalam pelaksanaan makin mampu menjalankan tugasnya secara lebih cepat dan tepat serta sarana dan prasarana hukum yang lebih memadai dalam rangka memelihara citra dan wibawa hukum.
3. Meningkatnya penyempurnaan produk hukum serta kegiatan dokumentasi dan informasi yang sesuai dengan perkembangan kondisi pada saat ini sehingga dapat menjamin kepastian hukum baik bagi pencari keadilan maupun penegak hukum.

POLITIK, APARATUR PEMERINTAH, PENERANGAN,

KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA

1. POLITIK.

- a. Meningkatnya Pembangunan Bidang Politik untuk memperkuat kehidupan konstitusional dan pengembangan budaya politik Pancasila sebagai salah satu unsur sistem politik demokrasi Pancasila yang didukung oleh peran Infra Struktur dan Supra Struktur politik dalam mekanisme kehidupan politik guna mewujudkan sikap keterbukaan .

- b. Meningkatnya pendidikan politik melalui usaha - usaha pemasyarakatan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang didukung oleh partisipasi Parpol dan Golkar untuk lebih memasyarakatkan kehidupan politik yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang berorientasi kepada program pembangunan yang merupakan tanggung jawab bersama parpol , Golkar dan pemerintah dalam usaha mensukseskan Pemilu 1997 serta Sidang Umum MPR 1998.
- c. Meningkatnya pembinaan peranan dan fungsi Organisasi kemasyarakatan/ lembaga - lembaga penyalur pendapat masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat yang seluas - luasnya dalam pembangunan, khususnya pembangunan mental dan Ideologi.

2. APARATUR PEMERINTAH.

- a. Meningkatnya kualitas Aparatur Pemerintah yang bersih dan berwibawa untuk mendorong pelaksanaan disiplin Nasional melalui penertiban dan pengawasan serta langkah - langkah penindakan terhadap Aparatur Pemerintah yang menyalah gunakan wewenangnya.
- b. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antar Instansi serta menciptakan keharmonisan antara eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan pemerintahan.
- c. Meningkatnya sarana dan prasarana fisik yang menunjang kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dalam melayani masyarakat serta menumbuhkan prakarsa dan partisipasi masyarakat.

3. PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA.

- a. Meningkatnya pelayanan dan pemerataan penerangan, pembinaan media penerangan, sarana dan prasarana operasional penerangan secara optimal dan penyediaan tenaga yang profesional sehingga kegiatan dan peranan media massa dapat lebih bermutu, berhasil-guna dan berdaya-guna.
- b. Meningkatnya komunikasi timbal balik antara Pemerintah dengan masyarakat lewat sarasehan, diskusi serta penyuluhan-penyuluhan yang edukatif dan manusiawi serta pelaksanaan sistem penerangan yang terpadu antar Dinas / Instansi / Swasta yang terkait.

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

1. Meningkatnya pembinaan kesadaran bela Negara Setiap Warga-Negara yang merupakan kehormatan dan membudayakan rasa cinta tanah air yang dilandasi keyakinan akan kebenaran Pancasila.
2. Meningkatnya kemanunggalan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan rakyat agar terwujud kekuatan Pertahanan Keamanan Negara yang handal dengan ketahanan mental ideologi yang tangguh.
3. Meningkatnya sistem keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan peran serta dari masyarakat terutama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan.

D. PRIORITAS PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM DAERAH

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah, maka prioritas Pembangunan

Lima Tahun Keenam Kotamadya daerah Tingkat II Salatiga adalah sebagai berikut :

1. Pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, pengurangan jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal melalui upaya peningkatan pembangunan pedesaan terpadu serta perluasan kesempatan kerja yang diupayakan melalui pembinaan industri kecil dengan memberi penekanan pada pengembangan sentra - sentra industri dan sumber - sumber pertumbuhan baru yang lain , serta peningkatan pembangunan sarana prasarana perdagangan dan transportasi.
2. Peningkatan intensitas kerjasama antar pelaku - pelaku ekonomi dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan sarana prasarana pendidikan yang semakin merata dan bermutu peningkatan mutu pelayanan kesehatan , peningkatan ketrampilan kerja dan meningkatkan kualitas Aparatur Pemerintah.
4. Pembangunan bidang lainnya terus ditingkatkan selaras dan serasi serta saling memperkuat dengan pembangunan bidang ekonomi sehingga keseluruhan pembangunan di Daerah merupakan satu kesatuan gerak dalam menumbuhkan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera.

E. KEBIJAKSANAAN PELITA KEENAM DAERAH

Dalam rangka mendukung kebijaksanaan Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Nasional, maka kebijaksanaan Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga adalah sebagai berikut :

U M U M

1. Melanjutkan dan- meningkatkan kebijaksanaan Pembangunan Lima Tahun Daerah, sehingga terdapat keseimbangan Program - program Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, di samping itu kebijaksanaan Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia dan kehidupan masyarakat agar semakin maju dan mandiri yang dijiwai nilai - nilai Pancasila.
Peningkatan usaha pemeretaan pembangunan dan hasil-hasilnya yang semakin luas, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, penciptaan dan perluasan lapangan kerja serta lapangan usaha dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang semakin adil dan merata .
2. Pembangunan Daerah yang semakin luas dan kompleks, memerlukan penanganan yang sangat hati - hati dan terpadu serta diperlukan peningkatan kualitas perencanaan , pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan yang dilandasi disiplin yang tinggi, tanggung jawab, semangat dan kemampuan Aparatur Pemerintah yang profesional.
3. Guna menjamin keserasian dan keterpaduan, pemerataan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, maka seluruh kegiatan pembangunan hendaknya mengacu pada rencana - rencana yang sudah berkekuatan hukum.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kesadaran dalam kehidupan bernegara , berbangsa dan bermasyarakat melalui jalur pendidikan, agama, pemasyarakatan dan pembudayaan P.4, kepemimpinan, seni budaya , ethos kerja dan kesetiakawanan sosial serta kesadaran hukum.
5. Penantaan Otonomi Daerah yang nyata, serasi, dinamis

dan bertanggung jawab melalui peningkatan dan pendayagunaan serta penyediaan sarana prasarana Aparatur Pemerintah di Daerah, pengelolaan pembangunan yang berkualitas untuk memperoleh produktivitas dan efisiensi kerja, peningkatan dan penggalian Pendapatan Asli Daerah Sendiri dan pembinaan masyarakat dalam kesatuan sikap serta berperan aktif dalam pembangunan.

6. Pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta peningkatan pendapatan masyarakat dengan upaya - upaya penyediaan sarana prasarana, memacu sektor - sektor dominan, mengembangkan usaha - usaha dan pengembangan dunia usaha khususnya pengusaha kecil, informal dan tradisional melalui pembinaan, bantuan permodalan, penyediaan fasilitas dan kemudahan - kemudahan lainnya.

7. Peningkatan sumber daya manusia dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya melalui pembinaan kesejahteraan keluarga yang sehat dan sejahtera, peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja dan berusaha, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat yang berorientasi kepada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia untuk mengatasi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

8. Pembangunan Pendidikan diselenggarakan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia serta kualitas sumber daya manusia dan memperluas serta meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan termasuk daerah pinggiran.

Peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga pendidikan lainnya, dan tahapan pembangunan serta penyediaan sarana dan prasana pendidikan yang memadai.

9. Pembinaan Olah raga sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan kondisi kesehatan fisik, mental, dan rohani manusia dalam pertumbuhan watak dan kepribadian disiplin dan sportivitas serta pencapaian prestasi yang setinggi-tingginya agar dapat meningkatkan citra para Atlit demi nama baik Daerah dan bangsa Indonesia.

Peningkatan prestasi Olah Raga perlu digalakkan melalui perencanaan dan pelaksanaan yang mantap dan terpadu serta dilakukan secara menyeluruh baik oleh pemerintah maupun peran serta masyarakat , dibarengi dengan upaya pembinaan secara dini serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

BIDANG - BIDANG EKONOMI

1. INDUSTRI.

Pembangunan Industri diarahkan untuk mewujudkan kemandirian perekonomian daerah dan meningkatkan kemampuan bersaing di pasaran melalui peningkatan mutu produksi, peningkatan sumber daya manusia dan kemampuan pemanfaatan pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memperkokoh struktur ekonomi yang seimbang sekaligus untuk memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta pendayagunaan sumber daya alam yang berdasarkan pada azas lestari.

Pembangunan industri kecil , rumah tangga dan tradisional perlu selalu dibina terus dan dikembangkan menjadi

usaha mandiri yang mampu meningkatkan pendapatannya serta semakin berperan dalam penyediaan lapangan kerja dan memproduksi bermacam-macam barang dan jasa sebagai pemenuhan kebutuhan.

Pembangunan industri hendaknya dilaksanakan secara bertahap, berencana dan terpadu untuk meningkatkan kemampuan pengalihan dan pengembangan teknologi industri yang mampu menguasai dan menerapkannya dalam menghasilkan barang dan jasa.

2. PERTANIAN.

Pembangunan Pertanian merupakan suatu perwujudan usaha untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidup yang meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan dan perikanan.

Pembangunan pertanian mencakup pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan diarahkan agar menjadi pertanian yang maju serta ditujukan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, menaikkan pendapatan dan taraf hidup petani, memperluas lapangan kerja serta mengisi dan memperluas pasar.

Pembangunan pertanian -khususnya pertanian tanaman pangan diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan produksi, peningkatan sumber daya manusia, mengembangkan komoditas agrobisnis dan agro industri serta penggalan potensi yang ada melalui cara pembinaan usaha tani peningkatan pemanfaatan lahan termasuk lahan pekarangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna serta meningkatkan kemampuan usaha dengan tetap memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Pembangunan peternakan diarahkan untuk meningkatkan

pendapatan petani peternak dan meningkatkan gizi masyarakat melalui usaha peningkatan jumlah dan mutu ternak, penyediaan dan pembinaan - pembinaan petani ternak, peningkatan usaha diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi ternak.

Pembangunan perikanan diarahkan pada penggalian dan pengembangan potensi yang ada dan peningkatan kualitas pengelolanya.

Pembangunan pengairan diarahkan untuk memelihara, perbaikan peningkatan produksi pertanian pertanian sekaligus memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat.

3. TENAGA KERJA.

Pembangunan Ketenaga Kerjaan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia diarahkan pada pembentukan tenaga profesional yang mandiri dan berethos kerja serta berwawasan kerja kedepan.

Pembangunan tenaga kerja ditujukan pada peningkatan tenaga kerja yang produktif dan ditujukan pada peningkatan tenaga kerja yang produktif dan bekerja secara optimal serta mempunyai jiwa wiraswasta sehingga mampu mengisi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja.

4. PERDAGANGAN.

Pembangunan Perdagangan diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat terselenggaranya tata niaga dan sistem distribusi barang/jasa secara lokal, regional maupun nasional.

Pembangunan perdagangan hendaknya ditujukan pada peningkatan daya saing sesuai perkembangan pembangunan, peningkatan pendapatan masyarakat,

menambah lapangan kerja, pemerataan kesempatan berusaha dan peningkatan pendapatan daerah , serta meningkatkan kerja sama antar usaha besar, menengah, dan kecil termasuk usaha informal terus didorong dan dikembangkan.

5. TRANSPORTASI.

Pembangunan Perhubungan Darat diarahkan untuk pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana / saran perhubungan darat untuk memperlancar dan memperluas arus barang dan jasa serta manusia secara tertib, aman, nyaman, dan effisiens.

Sistem angkutan kota hendaknya selalu ditingkatkan pengaturannya dan pelayanannya dengan meningkatkan kualitas aparat dan mendorong peran serta pihak swasta dan koperasi dalam pembangunan transportasi dengan menciptakan iklim dalam menumbuhkan kompetisi yang sehat dan saling menghidupi.

Pembangunan jalan hendaknya diserasikan dengan perkembangan angkutan jalan raya terutama keserasiaan antara beban dan kepadatan lalu lintas kendaraan dengan kemampuan daya dukung jaringan jalan dipusatkan pertumbuhan, pusat produksi dengan daerah pemasaran perlu terus ditingkatkan serta pembangunan jalan di kosentrasikan pada lingkaran dalam dan lingkaran luar.

Angkutan penumpang dan barang dalam kota , antar kota dan antar daerah dibina dan dikembangkan agar mampu berperan dalam kelancaran arus penumpang dan barang selaras dengan dinamika pembangunan.

Pembangunan jalan perlu ditingkatkan koordinasinya dengan pembangunan utilitas jalan agar efisien dan efektif serta kesemrawutan bisa ditekan.

6. DUNIA USAHA.

Pembangunan Dunia Usaha di Daerah diarahkan peningkatan usaha yang mampu mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh sebagai penggerak pembangunan ekonomi, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil - hasilnya.

Pembinaan Dunia Usaha perlu terus dilanjutkan untuk memperkuat kemampuan berusaha, peningkatan penyediaan kredit lunak dan fasilitas yang memadai agar terwujud iklim yang sehat bagi pelaku - pelaku ekonomi, sehingga dapat menjadi tulang punggung perekonomian daerah, memperluas lapangan kerja , meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pemerataan kesempatan berusaha serta meningkatkan PADS.

7. PARIWISATA.

Pembangunan Pariwisata diarahkan untuk mendukung Pariwisata Jawa Tengah melalui penggalian potensi yang ada dan mampu menggalakkan kegiatan ekonomi agar dapat memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

8. POS DAN TELEKOMUNIKASI.

Pembangunan Pos diarahkan untuk dapat menjangkau Pos dan Giro yang makin luas dan makin memasyarakat, serta dapat mencapai keseluruh daerah pinggiran, agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang mampu menjamin terselenggaranya arus surat, barang dan Jasa Giro yang lancar, cepat dan aman yang didukung oleh peningkatan sumber daya manusia.

Pembangunan Telekomunikasi diarahkan untuk menambah jaringan dan jangkauan telekomunikasi dengan menggunakan teknologi maju dan sesuai serta meningkatkan mutu dan efisiensi pelayanannya dengan didukung oleh peningkatan sumber daya manusia dan pemanfaatan, penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

9. KOPERASI.

Pembangunan Koperasi diarahkan pada Koperasi yang memiliki kemampuan mengembangkan usahanya sendiri dan mampu mensejajarkan dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya.

Disamping itu perlu ditingkatkan fungsi dan peranannya melalui peningkatan manajemen yang profesional serta mampu menumbuhkan kesadaran dan kegairahan berkoperasi.

10. PEMBANGUNAN DAERAH.

Pembangunan Daerah diarahkan pada pembangunan daerah yang dinamis artinya mampu menampung segala kegiatan pembangunan sesuai dengan perkembangan zaman yang diikuti dengan pembangunan daerah pinggiran secara serasi, selaras, seimbang dan berkesinambungan serta saling menunjang.

Pembangunan Daerah perlu dilanjutkan, ditingkatkan dan diselenggarakan secara berencana dan terpadu dengan memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang Kota, perkembangan penduduk dan lingkungan pemukiman, lingkungan berusaha serta kegiatan ekonomi lainnya.

11. PEMBANGUNAN KEUANGAN.

Pembangunan Keuangan diarahkan pada peningkatan

kemampuan daya guna keseluruhan tatanan , perangkat dan kelembagaan serta pengelolaan keuangan yang makin andal dan efisien untuk dapat mempercepat pencapaian pemerataan pembangunan dan hasil - hasilnya yang makin meluas dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis.

Penerimaan daerah terus diupayakan dengan menggali dan mengembangkan semua sumber penerimaan daerah terutama sumber penerimaan perpajakan dan retribusi, dengan tetap memperhatikan peningkatan pembiayaan pembangunan dan kemampuan masyarakat dan dunia usaha.

Penggunaan keuangan daerah direncanakan secara sistematis berdasarkan skala prioritas agar dapat memberikan dampak yang sebesar - besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

12. TRANSMIGRASI.

Pembangunan Transmigrasi diarahkan untuk mewujudkan transmigrasi Swakarsa secara teratur dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerataan / penyebaran penduduk , memperluas lapangan kerja dan pendaya-gunaan sumber daya alam serta untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

13. PEMBANGUNAN ENERGI.

Pembangunan Energi khususnya energi listrik diarahkan untuk perluasan jaringan listrik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga , industri dan untuk peningkatan penerangan jalan umum serta pengalihan tegangan dari 110 Volt . menjadi 220 Volt.

14. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup diarahkan pada terwujudnya kelestarian lingkungan hidup yang seimbang dan dinamis agar dapat menjamin kelangsungan pembangunan daerah dengan tujuan memelihara mutu dan lingkungan melalui usaha perlindungan dan rehabilitasi serta dapat memberikan manfaat yang sebesar - besarnya demi kesejahteraan masyarakat.

KESEJAHTERAAN RAKYAT, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. KESEJAHTERAAN SOSIAL.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga yang berpenghasilan rendah, pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial anak dan keluarga, pengentasan penyandang masalah sosial serta meneruskan jiwa perjuangan dan pengabdian para pejuang, bantuan dan penyantun bagi golongan masyarakat miskin, terlantar, para penyandang cacat dan korban bencana alam.

Disamping itu perlu ditingkatkan kemampuan lembaga - lembaga sosial dan masyarakat dalam rangka kegiatan pelayanan sosial dan turut serta mengatasi masalah kesenjangan sosial.

2. PENDIDIKAN.

Pembangunan Pendidikan diarahkan pada usaha peningkatan dan pemerataan pendidikan serta

meningkatkan kualitas manusia untuk mewujudkan manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, jujur, dan trampil serta sehat jasmani dan rokhani.

Pendidikan luar sekolah termasuk pendidikan kemasyarakatan perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan agar dapat mewujudkan kemandirian.

Pembinaan Pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi terus dilanjutkan , ditingkatkan dan dikembangkan yang mampu meningkatkan, memanfaatkan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mempunyai jiwa pengabdian dan rasa tanggung jawab masa depan bangsanya.

Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang berlangsung seumur hidup dilaksanakan dalam keluarga, sekolah dan masyarakat, maka pendidikan merupakan tanggung jawab kita bersama antara keluarga , masyarakat dan Pemerintah.

Disamping itu perlu melanjutkan , meningkatkan , memperluas dan memantapkan pendidikan Pancasila termasuk Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa serta unsur - unsur yang dapat meneruskan, memupuk dan mengembangkan jiwa semangat dan nilai Undang - Undang Dasar 1945 kepada generasi muda disemua jenis dan jenjang pendidikan formal maupun non formal di masyarakat.

3. KEBUDAYAAN.

Pembangunan Kebudayaan diarahkan untuk meningkatkan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat umum agar lebih sadar dalam melestarikan kebudayaan daerah / tradisional yang hidup dan berkembang di Daerah serta dapat menangkal masuknya kebudayaan asing

yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan mau menerima kebudayaan dari luar yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dalam rangka memperkaya kebudayaan daerah.

4. KESEHATAN.

Pembangunan Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, derajat kesehatan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan yang dapat terjangkau oleh lapisan masyarakat bawah serta pemerataan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan agar dapat mendorong makin meningkatnya peran serta masyarakat termasuk lembaga Swadaya masyarakat sehingga mampu menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan.

5. KELUARGA SEJAHTERA.

Pembangunan Keluarga Sejahtera diarahkan pada terwujudnya keluarga bahagia lahir batin dan sebagai wadah untuk membina keluarga agar mampu mendukung kegiatan pembangunan.

Hal ini perlu ditumbuh kembangkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera yang dilandasi oleh rasa tanggung jawab, kesukarelaan, nilai - nilai agama, dan nilai - nilai luhur budaya daerah.

Disamping itu kegiatan keluarga berencana perlu terus ditingkatkan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk dengan cara menekan angka kelahiran agar diperoleh keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi sehingga terwujud kesejahteraan keluarga.

6. ANAK DAN REMAJA.

Pembinaan Anak dan remaja dimulai sejak dini yang

dilaksanakan melalui peningkatan mutu gizi, pembinaan perilaku kehidupan beragama dan budi pekerti luhur, pertumbuhan minat belajar, peningkatan daya cipta dan daya nalar serta kreativitas, penumbuhan kesadaran hidup sehat, serta menumbuhkan idialisme yang tinggi dan patriotisme dalam pembangunan sebagai Pengamalan Pancasila dan peningkatan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan .

7. PEMUDA

Pembinaan dan pengembangan pemuda sebagai pewaris nilai - nilai luhur budaya dan penerus cita - cita perjuangan pendahulunya dan insan pembangunan diarahkan agar menjadi kader pemimpin yang berjiwa Pancasila , disiplin, peka, mandiri, berethos kerja, tangguh , memiliki idialisme yang tinggi dan kuat, berwawasan luas, mampu mengatasi tantangan dengan tetap memperhatikan nilai sejarah yang dilandasi dengan semangat membangun.

8. PERANAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN.

Pembangunan Peranan Wanita diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi wanita dalam pembangunan sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya, sehingga kedudukannya sejajar dengan kaum pria dibidang pembangunan.

9. PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN.

Pembangunan Perumahan dan Pemukiman diarahkan pada pembangunan secara merata melalui penyediaan kebutuhan pembangunan perumahan yang memenuhi syarat kesehatan, rasa aman, damai, tentram dan sejahtera khususnya golongan ekonomi lemah, dengan memperhatikan daya beli masyarakat , pembangunan dan rehabilitasi sarana air bersih dan peningkatan pemukiman yang sehat, baik itu penyediaan , perbaikan maupun

pemeliharaan lingkungan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

10. OLAH RAGA.

Pembangunan Olah Raga diarahkan pada peningkatan kesehatan fisik, mental dan rohani dalam rangka pembentukan watak dan kepribadian, disiplin dan sportivitas serta pencapaian prestasi yang maksimal untuk meningkatkan fungsi dan peran Kota Salatiga sebagai Kota Pendidikan dan Olah Raga.

Prestasi yang selama ini telah dicapai perlu dilanjutkan dan digalakkan melalui perencanaan dan pelaksanaan secara terpadu, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat melalui pembibitan yang berkesinambungan dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Pembangunan Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana peribadatan melalui kegiatan pemberian bantuan, swadaya dan peningkatan sumber daya manusia yang merupakan unsur strategi melalui penataran, sarasehan, temu karya Organisasi Keagamaan dan Pondok Pesantren serta pembinaan bagi calon jemaah Haji dan Qori Qoriah melalui training, penyelenggaraan MTQ di Daerah sebagai sarana untuk mencapai prestasi pada tingkat yang lebih tinggi.

ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan teknologi diarahkan pada peningkatan, pemahaman, penguasaan dan pemanfaatan

ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan dan berkesinambungan di berbagai sektor pembangunan guna menunjang keberhasilan pembangunan di Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu meningkatkan penelitian, pengembangan, pemanfaatan dan penguasaan ilmu pengetahuan terapan melalui peningkatan dan jumlah mutu tenaga penelitian yang mempunyai keahlian khusus, berdedikasi, berprakarsa, kreatif dan inovatif serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

HUKUM

1. MATERI HUKUM.

Pembangunan Materi Hukum diarahkan pada peningkatan pelaksanaan produk-produk hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 baik produk Nasional, Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah maupun Daerah Tingkat II sendiri agar dapat menjamin masyarakat memperoleh kepastian, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, menumbuhkan dan mengembangkan disiplin, ketertiban, kepatuhan dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat termasuk memberi rasa aman dan tenteram serta mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, guna mendukung stabilitas Nasional yang mantap dan dinamis.

2. APARATUR HUKUM.

Pembangunan Aparatur Hukum diarahkan pada terwujudnya aparat yang memiliki kemampuan profesional sebagai pengayom masyarakat.

3. SARANA DAN PRASARANA HUKUM.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Hukum diarahkan pada peningkatan Sarana dan Prasarana Hukum untuk menunjang keberhasilan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas - tugasnya.

POLITIK, APARATUR PEMERINTAH, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA

1. POLITIK.

Pembangunan Politik diarahkan untuk membangun kehidupan bangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 , mewujudkan stabilitas politik yang dinamis serta terus dikembang tingkatkan kesadaran dan peran serta politik masyarakat termasuk upaya pemantapan keyakinan rakyat terhadap Pancasila sebagai satu - satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara.

2. APARATUR PEMERINTAH.

Pembangunan Aparatur Pemerintah diarahkan pada pembinaan penyempurnaan dan pendayagunaan serta peningkatan kualitas dalam rangka menata dan mewujudkan sistem administrasi pemerintah yang semakin andal, profesional, efisien, efektif, tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika kehidupan yang dilandasi dengan pengabdian, kemampuan, disiplin, keteladanan dan kesejahteraannya sehingga mampu melaksanakan tugasnya secara baik.

ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan dan berkesinambungan di berbagai sektor pembangunan guna menunjang keberhasilan pembangunan di Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu meningkatkan penelitian, pengembangan, pemanfaatan dan penguasaan ilmu pengetahuan terapan melalui peningkatan dan jumlah mutu tenaga penelitian yang mempunyai keahlian khusus, berdedikasi, berprakarsa, kreatif dan inovatif serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

HUKUM

1. MATERI HUKUM.

Pembangunan Materi Hukum diarahkan pada peningkatan pelaksanaan produk-produk hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 baik produk Nasional, Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah maupun Daerah Tingkat II sendiri agar dapat menjamin masyarakat memperoleh kepastian, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, menumbuhkan dan mengembangkan disiplin, ketertiban, kepatuhan dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat termasuk memberi rasa aman dan tenteram serta mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, guna mendukung stabilitas Nasional yang mantap dan dinamis.

2. APARATUR HUKUM.

Pembangunan Aparatur Hukum diarahkan pada terwujudnya aparat yang memiliki kemampuan profesional sebagai pengayom masyarakat.

Selain itu ditingkatkan pula penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai dan penataan kelembagaan.

3. PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA.

Pembangunan Penerangan, Komunikasi dan Media Massa diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan pembudayaan nilai - nilai Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 diberbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga memperkokoh persatuan dan kesatuan Nasional, mempertebal rasa tanggung jawab sosial, mengembangkan komunikasi sosial serta menyalurkan aspirasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Daerah.

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Pembangunan Ketentraman dan Ketertiban diarahkan untuk mengembangkan sistem pertahanan keamanan yang bersifat swakarsa dalam rangka menunjang kelangsungan pembangunan dan mengamankan hasil - hasilnya serta meningkatkan perlindungan masyarakat yang dapat diandalkan dan selalu siap menghadapi segala hakekat ancaman.

F. KEBIJAKSANAAN PENATAAN RUANG.

Kebijaksanaan Penataan Ruang Daerah Perkotaan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dalam Pelita VI Daerah merupakan tahap awal dalam upaya memantapkan struktur tata Ruang Daerah perkotaan yang lebih berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Kebijaksanaan Penataan Ruang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga diarahkan pada pusat - pusat pertumbuhan yang strategis peningkatan fungsi dan peran kota sebagai kota Pendidikan dan Olah Raga , Pusat Kegiatan Perdagangan dan Transit Pariwisata.

Untuk mencapai struktur Tata Ruang Daerah Perkotaan yang ditetapkan kebijaksanaan Penataan ruang Daerah dalam Repelita VI Daerah akan berupa :

1. Mempersiapkan fungsi kota sesuai dengan peran dan fungsi kota yang telah ditetapkan.
2. Mempersiapkan pencapaian struktur perwilayahan pembangunan yang telah direncanakan.
3. Memberikan arahan bagi peningkatan kualitas kawasan kota yang telah ada dan pengembangan perencanaan pembangunan sistem sarana dan prasarana kebutuhan fasilitas dan utilitas pelayanan kota.
4. Memberikan arahan pengembangan dan peningkatan sistem sarana kota.
5. Memberikan arahan kebijaksanaan pada Daerah kawasan perkotaan yang secara strategis telah ditetapkan, mencakup kawasan di Daerah Perkotaan dan daerah pinggiran disekitarnya.

G. STRATEGI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Pembiayaan pembangunan dalam Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga masih akan ditopang oleh sumber dana dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, baik dana Pembangunan Inpres maupun sektoral.

Sedangkan peranan pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) dan Investasi Swasta relatif masih terbatas.

Dalam Garis - Garis Besar Haluan Negara (GBHN) disebutkan bahwa upaya peningkatan pembangunan daerah harus senantiasa didasarkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, dalam rangka lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, mendorong pemerataan pembangunan dan hasil - hasilnya diseluruh tanah air.

Akibat logis dari amanat Garis - Garis Besar Haluan Negara tersebut, maka upaya penanganan masalah pembiayaan pembangunan Daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga itu memerlukan langkah - langkah yang lebih menunjang terwujudnya kemandirian Daerah dalam pembiayaan Pembangunan Daerah yaitu :

1. Penggalan sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial secara optimal, terutama pajak dan retribusi daerah.
2. Peningkatan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak.
3. Mengarahkan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk mendorong dinamika masyarakat yang lebih baik, seperti memperluas lapangan kerja, memperbaiki distribusi pendapatan, serta mengembangkan sektor - sektor ekonomi yang pada gilirannya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
4. Mendorong keikut sertaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Swasta dalam pelayanan masyarakat di Daerah, baik sebagai penanam modal maupun sebagai pengelola jasa pelayanan masyarakat.
5. Meningkatkan tata hubungan yang saling menguntungkan antar sektor Swasta dan Pemerintah Daerah.
6. Membina Badan Usaha Milik Daerah yang ada agar semakin berkembang dan mandiri.
7. Mobilisasi dana masyarakat melalui peningkatan peran

bank, khususnya Bank Pembangunan Daerah, dan Lembaga - lembaga Keuangan lainnya

8. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan Pembangunan Daerah diperlukan pula sumber - sumber pembiayaan dari luar negeri, walaupun hanya merupakan pelengkap saja.

Sumber - sumber ini berupa bantuan asing melalui Pemerintah Pusat kepada pemerintah Daerah baik dalam bentuk hibah maupun pinjaman dengan syarat - syarat yang tidak memberatkan dan dalam batas kemampuan untuk pembayaran kembali.

Demikian pula bantuan asing kepada Pemerintah Daerah dapat berupa bantuan langsung (proyek) dari lembaga Pemerintah maupun dari Organisasi Non Pemerintah.

Disamping itu dana yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) diperuntukkan bagi pengembangan barang dan jasa yang diproduksi oleh dunia usaha Nasional di Daerah dan Koperasi.

BAB V

PELAKSANAAN

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah .

Sesuai dengan perkembangan keadaan maka Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Salatiga dilakukan atau diadakan penyempurnaan dan perbaikan selaras dengan perkembangan disegala bidang setiap Lima Tahun Sekali.

Pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dilakukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga yang dilaksanakan/ dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah dan Program Tahunan Walikotamadya Kepala Daerah dengan mendengarkan dan memperhatikan secara sungguh - sungguh saran - saran, usul - usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah merupakan tahap Pertama dari Pembangunan Daerah Jangka Panjang 25 Tahun Kedua.

Diharapkan mampu menghantar dalam memasuki proses tinggal landas dalam rangka menumbuhkan kemandirian bangsa.

Dengan demikian gerak pembangunan yang terencana senantiasa menjadi dasar pelaksanaan pemerintah daerah baik dalam bidang pembangunan maupun pembinaan masyarakat secara dinamis aktif sebagaimana tercermin dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun, untuk menetapkan kebijaksanaan tahunan berupa prioritas - prioritas Pembangunan Daerah.

Untuk terlaksananya kegiatan pembangunan secara bersamaan, pembangunan daerah tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari suksesnya pembangunan nasional.

Oleh karena itu rencana - rencana pembangunan dan pelaksanaan pembangunan harus diikuti pengawasan yang ada di Daerah termasuk sosial kontrol dari masyarakat serta fungsi kontrol dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B A B VI

P E N U T U P

Keberhasilan usaha - usaha pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga pada akhirnya akan melibatkan peran serta secara aktif dari seluruh masyarakat yang didukung oleh sikap mental, semangat untuk maju serta disiplin yang tinggi dari Aparat Pemerintah .

Rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat beserta citra Aparat Pemerintah yang bersih dan berwibawa merupakan modal dasar pembangunan yang sangat mendukung keberhasilan pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan ketangguhan peningkatan negara didalam menunjang pencapaian cita - cita nasional, yaitu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.